



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

(LKj)

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS**

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru
Kecamatan Kotaagung Timur

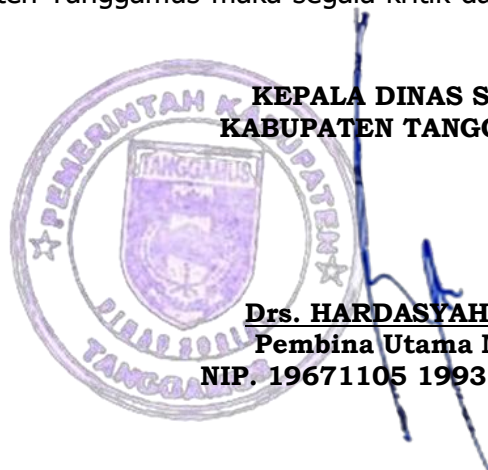
Telp. Fax 0722. 22330

E-Mail : dinsostanggamus@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Visi dan Misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Governance telah dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj). Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj), dengan mengacu pada Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kiranya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus ini dapat menjadi salah satu masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kabupaten Tanggamus TA 2025 dan kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu demi kesempurnaannya dalam rangka Peningkatan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus maka segala kritik dan saran sangat kami harapkan.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**

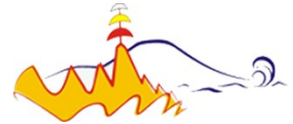
Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 GAMBARAN UMUM	4
1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN	4
1.3.2. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN	5
1.3.3. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	18
1.4 SISTEM PENYAJIAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	20
2.1.1. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	21
2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	21
2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	23
2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	24
2.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	24
2.2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (EVALUATED)	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	59
3.2 REALISASI ANGGARAN	68
3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	69
3.2.2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	70
BAB IV PENUTUP	71
4.1 UKURAN KINERJA	71
4.2 SIMPULAN	72
4.3 REKOMENDASI	72
LAMPIRAN :	
A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN	
A. PK & RKT	
A. RENCANA AKSI	
A. PENGHARGAAN	

BAB

I



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj). Penyusunan LKj Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

NO	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1	Undang-Undang	Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
2	Peraturan Pemerintah	Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus	Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47).
4	Peraturan Bupati Tanggamus	Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 382)

1.3 GAMBARAN UMUM

1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 382), Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 2 G lantai dengan 10 ruangan kerja dan 2 gudang.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin, Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi : Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia.
5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi : Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan, Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
6. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi : Seksi Penyuluhan Sosial, Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

1.3.2. TUGAS KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Secara lebih terperinci tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubbag sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai memimpin, merencanakan mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang sosial;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c) Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- e) Membimbing dan memotipasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
- f) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang sosial;
- g) Menandatangani naskah dinas yang bersipat prinsip dan naskah dinas lainnya untuk instansi di atasnya;
- h) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program dibidang sosial;
- i) Menetapkan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program kerja dibidang sosial;
- j) Merencanakan Operasional standar pelayanan minimal dibidang sosial;
- k) Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha dibidang sosial;
- l) Memberikan rekomendasi di bidang sosial;
- m) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- n) Melaporkan hasil kerja dibidang sosial dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- o) Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat);
- p) Mengevaluasi dan memonitoring kinerja bawahan;
- q) Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan untuk mewakili tugas-tugas yang bersipat strategis dan politis maupun yang bersipat kebijaksanaan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi kepegawian pengelolaan keuangan urusan rumah tangga urusan ketata usahaan, perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran di bidang keuangan, umum, kepegawaian, perencanaan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
- b) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c) Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program di bidang Sosial;
- e) Mengkoordinasikan dan menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dibidang Sosial;
- f) Pelaksanaan peraturan, penilaian ,pengumpulan dan analisa data serta penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas;
- g) Memilih dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum untuk disampaikan Kepada atasan atau kebidang lainnya;
- h) Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh atasan;
- i) Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrasi kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja lainnya yang berada dilingkup Dinas Sosial;
- j) Mengkoordinasikan persiapan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial;
- k) Bertanggung jawab atas keamanan dalam kantor terhadap personil ,materil,dan

informasi;

- l) Memberi petunjuk dalam proses perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan seluruh investasi dan usulan penghapusan barang inventaris;
- m) Mengkaji alternatif pemecahan masalah sebagai bahan bagi pimpinan untuk menetapkan kebijakan;
- n) Melaksanakan pengadaan, penyimpangan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan yang meliputi gedung peralatan teknis, alat kantor, mobilitas dan perbukuan Dinas Sosial;
- o) Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penggunaan anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran aparatur dan publik;
- p) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- q) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- r) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, umum dan keuangan kepada Kepala dinas;
- s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagian umum dan kepegawaian;
- Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program serta rencana anggaran di bidang sosial;
- Memberi petunjuk tentang pengelolaan urusan surat menyurat;
- Menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas serta inventaris kantor lainnya pada dinas sosial;
- Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan dinas sosial;

- Memilih naskah dinas untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan bidang dan tingkatan nya;
- Menyusun perencanaan keuangan belanja rutin dan belanja kepegawaian dinas sosial;
- Menyusun konsep teknis pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- Mengontrol pendistribusian barang dilingkungan dinas sosial;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pembinaan kepegawaian menyusun rencana peningkatan kualitas SDM dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK);
- Memproses izin cuti kepegawaian dan melayani pembuatan administrasi kepegawaian;
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dinas sosial;
- Menata naskah surat-surat dari dan pada dinas sosial;
- Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data kepegawaian, menyusun laporan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan SIMPEG (sistem informasi manajemen kepegawaian) pada dinas sosial;
- Melaksanakan pengurusan tatausaha pegawai (DUK, KARPEG, KARIS, KARSU, DP3 dan daftar Hadir) pada dinas sosial;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah oleh atasan;

b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Mendistribusikan dan Memberikan Petunjuk pelaksanaan kepada Bawahan;
- Memantau dan mengendalikan Kegiatan Bawahan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program dan rencana anggaran di bidang sosial;
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swsta dalam rangka pelaksanaan program di bidang sosial;

- Merencanakan kebijakan pembangunan dibidang sosial;
- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dibidang sosial;
- Menyiapkan bahan pembinaan sistem pengumpulan pengolahan penyajian dan publikasi data bidang sosial;
- Mengkoordinasikan dan pembinaan dalam penyusunan daftar usulan kegiatan dilingkup dinas sosial;
- Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang sosial;
- Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas sosial;
- Menghimpun dan menyusun laporan triwulan dan semester dan tahunan;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Sub Bagian Pengolahan data;
- Mendistribusikan Tugas dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan petugas;
- Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap petugas bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran (kasir, penyimpan uang, pengelolaan dan pembuatan SPP gaji, Pengelolaan pembukuan dan pembuatan dokumen penerimaan dan pengeluaran uang);
- Melakukan evaluasi terhadap pengeluaran gaji, belanja operasional pemeliharaan dan belanja modal;
- Pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- Membimbing bawahan agar dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengawasi tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan baik prosedur

maupun tanggung jawab;

- Menelaah dan meneliti laporan hasil pemeriksaan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu yang diambil dalam rangka pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
- Melakukan pencatatan realisasi penggunaan keuangan;
- Melaksanakan bimbingan terhadap staf di lingkungan Sub bidang keuangan;
- Melaksanakan evaluasi kerja dilingkup Sub Bagian Keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Sub Bagian keuangan Kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan;

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur Dan Mengawasi kegiatan bagian Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Pemberdayaan Sosial;
- b) Mendistribusikan kepada bawahan;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
- e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;
- f) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan fakir miskin
- g) Penyelenggaraan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial
- h) Menyiapkan bahan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial;
- i) Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana, kebersihan, perawatan aset dan kelengkapan untuk upacara pada Taman Makam Pahlawan;

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga & Fakir Miskin**, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja operasional di bidang Pemberdayaan Keluarga dan fakir Miskin;
- Mendistribusikan Tugas kerja kepada bawahan;
- Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengatur pembagian tugas kepada bawahan
- Berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan Keluarga dan fakir Miskin;
- Memberikan penyantunan, pelayanan terhadap Keluarga dan fakir Miskin di Kabupaten Tanggamus;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- Meneliti hasil kerja bawahan Seksi Pemberdayaan Keluarga dan fakir Miskin;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

b) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bagian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Membagi tugas kerja kepada bawahan;
- Memberikan petunjuk tugas kepada bawahan;
- Mengatur membagi tugas kepada bawahan;
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Melaksanakan penyiapan identitas sasaran kegiatan pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan bagian Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Rehabilitasi Sosial;
- b) Mendistribusikan kepada bawahan;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
- e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;
- f) Penyelenggaraan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, korban NAPZA dan tuna sosial;
- g) Penyelenggaraan Rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Anak, Remaja, Dan Lansia, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja operasional di Seksi Pelayanan Sosial, Anak, Remaja dan Lansia;
- Mendistribusikan Tugas kerja kepada bawahan;
- Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia;
- Melaksanakan penyiapan identifikasi sasaran pelayanan sosial anak, remaja

dan lanjut usia;

- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia;
- Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja operasional di Seksi Rehabilitasi sosial;
- Mendistribusikan tugas kerja kepada bawahan;
- Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengatur membagi tugas kepada bawahan;
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, Penyandang cacat dan tuna Sosial, remaja dan lanjut usia;
- Melaksanakan penyiapan identifikasi sasaran pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;
- Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Bagian Bantuan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
- e) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial;
- f) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- g) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- h) Melakukan Kegiatan urusan jaminan Kesejahteraan Sosial;
- i) Melakukan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- j) Menilai Prestasi kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- k) Menilai hasil kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- l) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Bantuan dan Jamsos;
- m) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial Dan Tindak Kekerasan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan Bidang Bantuan dan J aminan Sosial;
- Mendistribusikan Tugas dan memberikan Petunjuk kepada Bawahan;
- Mengkoordinasikan kegiatan kebawahan;
- Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;
- Mengkoordinasikan dengan (SKPD)/Lembaga Teknis lainnya dalam rangka Pelayanan Bantuan Sosial;
- Berkoordinasi dengan Dinas terkait dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana

(TAGANA);

- Melakukan pembinaan, pengendalian dan penanggulangan korban Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan;
- Melaksanakan pengendalian dan Pengorganisasian bantuan sosial;
- Melaksanakan pengawasan terhadap Bantuan Sosial;
- Memberikan petunjuk Kepada Bawahan;
- Mengatur Pembagian tugas Kepada Bawahan
- Mengevaluasi Hasil Kerja Bawahan;
- Menilai Prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam Pengembangan karir;
- Melakukan pengendalian dan pengkoordinasian Sumbangan Sosial;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan;

b) Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja operasional dan rencana Anggaran di Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
- Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Lembaga Teknis lainnya dalam rangka Pelayanan Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
- Mendistribusikan dan memberikan Petunjuk Kepada Bawahan;
- Mengkoordinasikan kegiatan kebawahan;
- Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;
- Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan kegiatan jaminan dan perlindungan Sosial;
- Melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Melaksanakan koordinasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi kesejahteraan Sosial (ASKESSOS);
- Melaksanakan pengadministrasian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS);
- Melakukan penyiapan dan pelaksanaan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- Melakukan kegiatan evaluasi monitoring dan pelaporan kegiatan Bantuan

Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

6) Bidang Pengembangan Sosial

Kepala Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Bidang Pengembangan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Pengembangan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Pengembangan Sosial;
- b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;
- e) Melaksanakan kegiatan Pembinaan potensi dan sumber Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pembinaan KT, WKBSM, PSM, ORSOS dan Kerja sama dengan lintas sector dan Dunia Usaha;
- f) Menginventarisasi data PSKS dan PMKS di Kabupaten Tanggamus;
- g) Melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian sumbangan Sosial di Kabupaten Tanggamus;
- h) Melaksanakan kordinasi Inter dan Intra Sektoral dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Bidang Pengembangan Sosial;
- i) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- j) Meneliti hasil kerja bawahan Bidang Pengembangan Sosial;
- k) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;
- l) Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial Bidang Pengembangan Sosial;
- Mendistribusikan Tugas dan Petunjuk kepada Bawahan di Seksi Penyuluhan

dan Pemberdayaan Sosial Bidang Pengembangan Sosial

- Mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan;
- Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;
- Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Sosial
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengkordinasian Sumbangan Sosial;
- Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial, Pondok Pesantren, dan Yayasan Sosial/Panti Asuhan;
- Melaksanakan Pembinaan Kepada Keluarga/Janda Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
- Melaksanakan Kegiatan Pendataan, Penyiapan dan Penyempurnaan data PMKS dan PSKS; ;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Sumbangan Sosial;
- Melaksanakan Kordinasi dengan Instansi terkait Kegiatan Sumbangan Sosial;
- Menilai Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pertimbangan Pengembangan karir;
- Mengevaluasi Hasil Kerja Bawahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

b) Kepala Seksi Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja operasional dan rencana Anggaran Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- Mendistribusikan Tugas dan petunjuk kepada bawahan seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Bidang Pengembangan Sosial;
- Mengkordinasikan kegiatan kepada bawahan;
- Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan Karang Taruna;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- Menyiapkan bahan Pembinaan dan pengawasan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- Melakukan Inventarisasi data TKSM dan PSM;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan ORSOS,TKSM,KT dan WKBSM;
- Pemantapan TKSK
- Merencanakan, Mengkordinasikan kegiatan pembinaan potensi Sosial

Kemasyarakatan (PPSK)

- Melakukan Pembinaan Kepada Keluarga/Janda Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
- Menilai Prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Atasan.

1.3.3. Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebanyak 46 yang terdiri dari 23 PNS dan 23 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1		1
2.	Golongan IV/b	1	1	2
3.	Golongan IV/a	2	1	3
4.	Golongan III/d	4	3	7
5.	Golongan III/c	3	1	4
6.	Golongan III/b	1		1
7.	Golongan III/a	1	1	2
8.	Golongan II/d	2		2
9.	Golongan VII		1	1
10.	PPPK Paruh Waktu	12	10	22
Jumlah		27	21	48

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Sumber Daya Aparatur			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1	S2	6	0	0	6
2	S1	13	1	5	19
3	D3	4	1	1	6
4	SMA	0	1	16	17
5	SMP	0		0	0
6	SD	0		0	0
Jumlah		23	3	22	48

1.4 SISTEM PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 GAMBARAN UMUM
 - 1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN
 - 1.3.2. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
 - 1.3.3. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA
- 1.4 SISTEM PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.1. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.4. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - 2.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
 - 2.2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (EVALUATED)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.2. REALISASI ANGGARAN
 - 3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
 - 3.2.2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

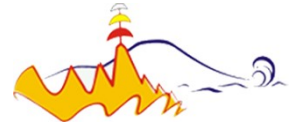
BAB IV PENUTUP

- 4.1 UKURAN KINERJA
- 4.2 SIMPULAN
- 4.3 REKOMENDASI

LAMPIRAN

- A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN
- B. PK & RKT
- C. RENCANA AKSI
- D. SOP
- E. DAFTAR PENGHARGAAN

RAR II



PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (5) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Nomor 050/5133.a/30/2025 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. VISI , MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

<i>VISI</i>	<i>" Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas "</i>
MISI I	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

MISI II	Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing
MISI III	Memastikan Pemerataan Pembagunan Dari Desa Ke Kota
MISI IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
MISI V	Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus melaksanakan misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing**. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Adalah **Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**.

2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

a. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Untuk lebih jelasnya,

identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS kabupaten}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100 \%$	12.38	12.22	12.08	11.93	11.79
			Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS Kabupaten}} \times 100 \%$	87.82	88.30	89.04	89.34	89.60

2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

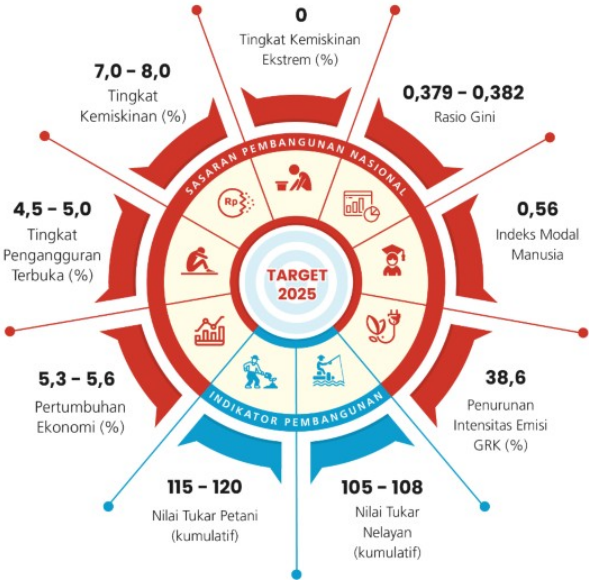
Gambar III.1. Tema Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar III.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar III.3. Prioritas Nasional 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel III.4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode	2,5±1,0 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300–15.900 ^{a)}
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3–147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	5,8–5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,6)–(0,6) ^{b) c)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30–12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,1–10,3 ^{d)}
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,14)–(0,61) ^{a) c)}
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,29)–(2,82) ^{a) c)}
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	37,82–38,71 ^{a)}
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,23–1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; c) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; d) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan

pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *marketintelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta

meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement/comprehensive economic partnership agreement*.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel III.1 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Isu

- Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif;
- Memudarnya etika sosial, moral, dan budaya;
- Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme;
- Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang (sebanyak 45,8%);
- Penerapan Pancasila di masyarakat masih kurang (sebanyak 30,3%);
- Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa;
- Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan;
- Penetrasi media konvensional di masyarakat jauh berkurang. Tingkat penetrasi televisi selalu di atas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. Berbanding terbalik dengan media *online* yang sudah mencapai 70-an%, serta media sosial 62%;
- Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi);
- Catatan KPK sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan terdapat 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi;
- Pada rentang 2021-2023, ICW mencatat terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi;
- Terdapat 125 permohonan *judicial review* terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019-2024;
- Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023);
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020) akibat COVID-19;
- Masih ditemukan kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per 2021);
- Sejak 2020-2023, Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM (11.722 pengaduan);
- Minimnya Pendidikan HAM secara berkelanjutan bagi penyelenggara negara dan non-penyelenggara negara;
- Indonesia belum meratifikasi beberapa perjanjian utama internasional tentang hak asasi manusia;
- Pada umumnya, pendekatan pemajuan dan penegakan HAM adalah secara nasional dan belum dilaksanakan berdasarkan kekhususan geografis dan demografis setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peluang dan Faktor Pendorong

- Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa, dan keadilan sosial;
- Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia;
- Adanya keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Koalisi antara Dewan Pers dan *civil society* yang semakin menguat untuk mewujudkan praktik demokrasi substansial;
- Optimalisasi dan agresivitas organisasi pers;
- Sinergitas akademisi dan praktisi dalam pelaksanaan program pelatihan dan inovasi bagi jurnalis/perusahaan pers;
- Nilai kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia bersumber dan
- Organisasi kemasyarakatan menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan;
- Semakin kuatnya hubungan anggota legislatif dan konstituen yang didukung platform artikulasi dan partisipasi digital;
- Masyarakat sipil menjadi *counterbalance* dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi;
- Adanya berbagai instrumen hukum, seperti Perpres No.53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM dan Strategi Nasional HAM yang dapat digunakan untuk mengoptimisasi pengarusutamaan dan pemajuan HAM secara nasional;
- Terdapat pedoman penyusunan kebijakan dan regulasi yang dapat membantu mengurangi kebijakan diskriminatif serta memastikan kebijakan yang disusun memenuhi standar HAM

Arah Kebijakan

- Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
- Penguatan Lembaga Demokrasi
- Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
- Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025-2029 sebagai

berikut.

Tabel III.2 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan				
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16	20
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	65,6	65,7	66,1
No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
4	<i>Global Cybersecurity Index</i>	100	100	98
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	82,0
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
11	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita) ^{b)}	59,59	59,31	63,54
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) ^{b)}	24 (2020)	39,20	51,36
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,21 (2023)	12,5	30
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan				
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
15	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
17	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	2025 ⁴	77,20
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)

19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,02 (2023)	18,37	21,12
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) ^{b)}	23,48 (2023)	26,67	30,11
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023) ^{c)}	76,49	77,20
23	Indeks Kualitas Udara ^{b)}	88,67 (2023) ^{c)}	78,53	79,49
24	Indeks Kualitas Air ^{b)}	54,59 (2023)	72,02	72,77
25	Indeks Kualitas Lahan ^{b)}	61,79	77,97	78,19
26	Indeks Kualitas Air Laut ^{b)}	78,84	81,02	81,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1



Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

Isu

- **Dinamika geopolitik global** dan adanya **potensi eskalasi ketegangan** di Kawasan.
- **Dinamika geoekonomi di tingkat global**, termasuk fenomena *friendshoring* dan *nearshoring*.
- Masih adanya **Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)** baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- **Ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** yang menjadi jalur strategis perairan.
- **Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial** serta **tingginya trafik anomali** yang berpotensi **mengancam aktivitas ruang siber** Indonesia.
- **Keamanan Nasional belum mampu menjadi landasan transformasi** yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan.

Arah Kebijakan

- Pembangunan postur pertahanan
- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
- Komponen cadangan dan komponen pendukung
- Intelijen dan keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi, dan sinyal
- Keamanan laut dan hidro-oseanografi
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Profesionalisme pelayanan kepolisian
- Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

Sasaran 2



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan** (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
- **Menurunnya Lahan Baku Sawah (LBS)**, dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
- Sekitar **89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan** (BPS, 2021);
- Terjadinya **stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan**, diantaranya penurunan produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,08 juta ton GKG tahun 2023
- Sekitar **12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan** (Badan Pangan Nasional); *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
- Perlunya **penguatan cadangan pangan nasional** untuk menghadapi berbagai kondisi;
- **Berfluktuasinya harga pangan** antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
- **Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian** (BPS);

Sasaran 3



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Reserve to Production Energi Fosil** semakin menurun (minyak bumi 10,92 tahun, gas bumi 14,57 tahun, dan batubara 41,32 tahun).
- **Impor migas semakin meningkat** selama 5 tahun terakhir (8 persen/tahun).
- **Cadangan Penyanga Energi (CPE) belum tersedia** (BBM 9,64 Juta Barrel, LPG 525,78 Ribu MTon, Minyak Bumi 10,17 Juta Barrel (Perpres 96/2024)).
- **Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah** dibandingkan potensi yang ada (12,6 GW dari 3.687 GW).
- **Potensi Bahan Baku Bioethanol yang melimpah** (tebu 75 ton/ha/tahun, singkong 30 ton/ha/tahun, Jagung 8 ton/ha/tahun).
- **Kapasitas Pabrik Bioethanol masih minim** dibandingkan permintaan pasar (63.000 kl/tahun dari 110.748 kL/tahun).
- **Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar** (43%).
- **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2023**

Arah Kebijakan

Swasembada energi

Sasaran 4



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- Kebutuhan Air tahun 2045 diproyeksikan meningkat 31% dari kebutuhan air tahun 2020.
- Kapasitas Tampung per Kapita Indonesia berada di bawah negara-negara dengan variabilitas musim yang serupa.
- Kapasitas *idle* SPAM dan NRW masih tinggi.
- 80% dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik.
- Terdapat hutan dan lahan kritis seluas 12,7 juta ha.
- Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air.
- Rendahnya kinerja BUMD air minum (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat).
- Hanya 25% kabupaten/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik.
- Hanya 10,21% (2023) rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman.
- Masih ada 203 kabupaten/kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLT atau IPAL).

Arah Kebijakan

Swasembada air

Sasaran 5



Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

Isu

Ekonomi Syariah

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar (Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023/2024)
- Masih rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI (baru mencapai sekitar 3,8% dari total impor produk halal negara-negara OKI)
- Masih terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal (baru sekitar 0,2% dari total UMKM pada tahun 2022)
- Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia (size aset keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi ke-7 global, dan market share terhadap keuangan nasional baru sekitar 12% pada tahun 2023).
- Masih belum optimalnya pengelolaan (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dengan database yang belum terintegrasi.

Ekonomi Digital

- Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal, dan tingkat maturitas digital yang masih terbatas
- Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing nasional
- Belum terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital
- Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah se-ASEAN (Indonesia 62% di bawah rata-rata ASEAN 70%)
- *Link and match* kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri

Ekonomi Biru

- Kontribusi PDB maritim hanya mencapai 7,93% (2022)
- Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sebesar 49,56
- Produksi garam masih rendah dan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dipenuhi melalui impor
- Belum terintegrasinya riset maritim dengan kebutuhan dunia industri

Arah Kebijakan

- Ekonomi syariah
- Ekonomi digital
- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

Sasaran 6



Terwujudnya transformasi ekonomi hijau

Isu

- Tiga krisis global yang terus meningkat: **Triple Planetary Crisis**, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif** yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem.
- **Produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat** mencapai 67,8 juta ton per tahun di tahun 2029, dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2029 (skenario BAU).
- **Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh** pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.
- Sebanyak 1.074 **tumbuhan**, 1.274 **satwa liar**, dan 2 **spesies fungi** Indonesia tercatat dalam kategori terancam (*threatened species*).
- **Pengelolaan kawasan hutan Indonesia** yang mencakup 62% dari total daratan **masih belum optimal** meskipun potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan di 9.291 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.
- **Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan (green jobs)** sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan transisi energi.
- **Penuntasan layanan dasar wajib sampah** mengingat pengumpulan sampah baru menjangkau 35% rumah tangga. Hanya 20% rumah tangga yang sudah mempunyai tempat sampah tertutup serta hanya 6% rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan dan mendapatkan layanan persampahan.
- **Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill**, di mana saat ini 40% TPA *open dumping* dan menyebabkan kebocoran sampah ke laut. Kebocoran sampah plastik ke laut diestimasikan mencapai 0,5 juta ton per tahun.

Arah Kebijakan

- Ekosistem ekonomi sirkular
- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- Pembangunan rendah karbon
- Pekerjaan hijau/*green jobs*
- Pengelolaan hutan lestari

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan

Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk member ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan

perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-2029) pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut.

Tabel III.3 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0	11,2
5	Aset Asuransi/PDB (%) ^(a)	9,0 (2023)	9,1	10,5
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68,0
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0	93,0

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35,00	46,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10	1,20
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,30
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,60
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan stasaran-sasaran pembangunan Pada Prioritas Nasional 3, disusun arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran 1

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu

- Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 Jam/100 Km) relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya seperti di Malaysia 1,09 Jam/100 km, Thailand 1,30 jam/100 km dan Vietnam 1,96 jam/100 km)
- Rendahnya muatan balik dari Kawasan Timur (30% dari kapasitas) disebabkan terbatasnya kawasan ekonomi dan belum adanya hub domestik di wilayah Timur
- 90% lalu lintas penerbangan masih terpusat di 5 Bandara Primer (Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, dan Sultan Hasanuddin)
- Terdapat lebih dari 100 Airstrip di Papua yang kondisi prasarannya belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan
- Skema layanan dan keterpaduan perencanaan transportasi darat, kereta api, laut, dan udara bersubsidi belum optimal
- Pangsa angkutan kereta api regional masih rendah, di sisi lain memiliki keunggulan ekonomis pada jarak menengah (750-1.500 km) dengan demand besar dan menerus
- Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas (Rp65 triliun per tahun) yang diakibatkan terbatasnya sistem angkutan massal perkotaan (pansa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih dibawah 20%)

- Coverage and usage gap fixed broadband yang tinggi. Hingga TW IV 2023, 53,01% wilayah Indonesia dan 97,44% permukiman telah terjangkau sinyal 4G, sementara cakupan 5G mencapai 0,15% wilayah dan 3,73% permukiman, serta 68,49% kecamatan telah memiliki Optical Distribution Point (ODP)
- Kecapatan internet di Indonesia masih rendah di angka 24,96 Mbps dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi nomor 9 di Kawasan Asia Tenggara (Speedtest Global Index, 2023)
- Kapasitas pusat data di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 200 MW, masih jauh di bawah kebutuhan ideal untuk melayani populasi sebesar 270 juta jiwa yang diprakirakan memerlukan kapasitas hingga 2.200 MW
- Kerangka regulasi dalam menghadapi risiko global terkait teknologi, termasuk kekurangan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur inovasi digital dan dampaknya (Global Risk Report, 2023)
- Tata kelola ruang digital Indonesia belum kondusif dan belum fair playing field bagi industri

- Belum optimalnya tata kelola jalan daerah yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, dari 504.672 km jalan (nasional, provinsi, kab/kota) sebesar 28% mengalami kerusakan (77% di antaranya merupakan jalan daerah)
- Terdapat **backlog** antara kebutuhan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM pencarian dan pertolongan (pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan masih sebesar 42%)
- Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan **Over Dimension & Over Load (ODOL)** menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebesar 40%-50% kendaraan di Lintas Utama Pulau Jawa dan 30%-40% kendaraan di Sumatera tergolong ODOL
- Belum terpenuhinya target jumlah lulusan diklat teknis pendidikan dan diklat pemberdayaan masyarakat keselamatan *safety and security* (persentase jumlah lulusan masih di bawah 50% pada tahun 2023)
- Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga kualitas layanan ketenagalistrikan masih rendah, serta *lock-in* dan ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil masih tinggi (Konsumsi listrik per kapita 1.337 kWh di tahun 2023)
- **Supply-Demand dan Spatial Mismatch** terutama sumber daya energi terbarukan dan pusat beban/permintaan energi listrik (Kapasitas pembangkit listrik 91 GW dan Panjang jaringan transmisi sebesar 87.691 kms kumulatif di tahun 2023)
- Kebutuhan investasi yang besar dan ketergantungan terhadap pembiayaan dan teknologi dari luar negeri
- Masih tingginya alokasi subsidi dan kompensasi listrik serta penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran (subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun)

Arah Kebijakan

- Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

Sasaran 2



Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

Isu

- **Dangkalnya kedalaman sektor keuangan**, terutama pada sektor keuangan nonbank (sektor keuangan masih didominasi perbankan)
- Belum efisiennya struktur perbankan yang mendorong tingginya *cost of fund*
- Belum optimalnya fungsi intermediasi (penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan belum optimal disalurkan kepada sektor prioritas)
- Rendahnya penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta terbatasnya diversifikasi produk
- Rendahnya basis investor dan instrumen investasi pada pasar modal
- Rendahnya literasi dan tingginya *gap* antara inklusi dan literasi keuangan

Arah Kebijakan

- Pendalaman Sektor Keuangan

Sasaran 3



Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

Isu

- Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik
- Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian
- Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM
- Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri
- Belum optimalnya ekosistem usaha, termasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM

Arah Kebijakan

- Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

Sasaran 4



Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

Isu

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Arah Kebijakan

- Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran 5



Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Isu

- Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual
- Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah
- Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah

Arah Kebijakan

- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
(a)	Membaca	359 (2022) ³⁾	396	409
(b)	Matematika	366 (2022) ³⁾	404	416
(c)	Sains	383 (2022) ³⁾	416	426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
(a)	Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
(b)	Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) ²⁾	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) ²⁾	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023) ⁴⁾	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{c)}	189 (2020) ²⁾	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ^{c)}	21,50 (2023) ⁵⁾	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ^{c)}	387 (2023) ⁶⁾	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ^{c)}	98,42 (2024) ⁷⁾	98,6	99

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) ²⁾	92,02–92,11	92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,30	0,45
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,30–58,80	56,70–60,89
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>	2	4–6 (2028)	
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Paralympic Games</i>	1	4–6 (2028)	
27	Peringkat pada <i>Asian Games</i>	13 (2023)	9–11 (2026)	
28	Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	6 (2023)	5–7 (2026)	
29	Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3 (2023)	3	2–4
30	Peringkat pada <i>ASEAN Para Games</i>	1 (2023)	1–2 (2029)	
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04 ¹⁾	10,36–11,45 ¹⁾	12,13–13,40 ¹⁾

Keterangan: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1 

Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

Isu

- Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD (APK 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK 86,34%); sementara tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (66,79%)
- Akses terhadap listrik dan internet masih terbatas sebanyak 2.458 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik dan internet
- Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi satuan pendidikan dalam menampung peserta didik (23,33% ruang kelas rusak ringan dan 21,84% ruang kelas rusak sedang-berat-total)
- Kualitas pendidikan masih rendah (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53)
- Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1% siswa mengalami bullying
- Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%
- Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan PT (Diploma & S1/S2/S3) mencapai 9,39%
 - 2,83% lulusan PT masih ada yang bekerja di bidang keahlian rendah
- Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023)
- Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih belum optimal yang tercermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar *human capital and research* pada GII 2024
- Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi, yang tercermin dengan nilai budaya literasi 60,49 di 2023

Arah Kebijakan

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)*
- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi

Sasaran 2



Terwujudnya kesehatan untuk semua

Isu

- **Angka Kematian Ibu** masih tinggi (189/100.000)
- **Stunting** masih tinggi (21,50 persen)
- **Prevalensi obesitas** terus meningkat (23,4 persen)
- **Wasting** masih tinggi (8,5 persen)
- **Kasus baru tuberkulosis** peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk)
- **Kasus baru kusta** peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 39,96 persen **puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes** sesuai standar
- Masih terdapat 27,9 persen **Rumah Sakit Umum Daerah kelas C** belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- **Rumah sakit terakreditasi paripurna** masih belum optimal (37,0 persen)
- **Puskesmas terakreditasi paripurna** masih belum optimal (28,0 persen).

Arah Kebijakan

- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
- Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

Sasaran 3



Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Isu

- **Tingginya angka perceraian** di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024)
- **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** masih rendah (63,63)
- **18 dari 100 anak laki-laki/perempuan 13-17 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024)
- **Proporsi perempuan usia 20-24 tahun** yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 6,92%
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** cenderung stagnan (91,85)
- **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** masih tinggi (0,447)
- **6,6% perempuan 15-64 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (SPHPN, 2024)
- **46,3% anak perempuan 15-49 tahun** mengalami P2GP (sunat perempuan) (SPHPN, 2024)
- **Indeks Pembangunan Pemuda** belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NEET masih tinggi (25,80%; Sakernas 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan ketangguhan keluarga
- Peningkatan kualitas perlindungan anak
- Peningkatan kualitas pemuda
- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

Sasaran 4



Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

Isu

- **Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya** masih rendah, ditandai dengan capaian 2023 hanya sebesar 3,57%
- **Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi** masih rendah (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB)
- **Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi** masih rendah (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2024 dengan *pilar knowledge and technology outputs* yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara)
- **Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya** belum dikelola dengan baik ditandai pengeluaran iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,26% dari PDB
- **Potensi supply iptek dan inovasi besar** (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum diorkestrasi secara nasional dan dipertemukan secara optimal)
- **Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah** (33,70% penduduk berkualifikasi pendidikan menengah-tinggi yang bekerja di bidang keahlian rendah)
- **Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah**, yaitu 19% dari tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat (APO, 2024). Angka tersebut juga berada di bawah rerata Kawasan ASEAN (20%). Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya angkatan kerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah sebesar 52,32% (BPS, 2024), ketidaksesuaian keahlian (*skill-mismatch*) di pasar kerja, belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel, tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI), rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional

Sasaran 5



Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Isu

- Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024)
- Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional saat tidak menjadi tuan rumah menurun signifikan (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023)
- Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%; 2023)
- Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk >10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit; 2021)
- Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk >10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah; 2021)
- Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang (86 orang cabor olimpiik sementara paralimpiik belum ada; 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industriatisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumberdaya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,80	21,90
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehinggamampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untukmewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Isu

- Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 20,99% (2015) menjadi 18,67% (2023)
- Peringkat *Competitive Industrial Performance Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-39) masih berada di bawah Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25), dan Malaysia (ke-20)
- Struktur Industri Pengolahan Indonesia masih didominasi oleh *Resource Based* dan *Low-Technology Industry*
- Peringkat dalam *Economic Complexity Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-64) masih dibawah Vietnam (ke-61), India (ke-42), Malaysia (ke-28), Thailand (ke-23), dan China (ke-18)
- Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam 4 dekade terakhir
- 88,7% Tenaga Kerja Indonesia masih didominasi oleh *unskilled labor* dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi STEAM
- Tuntutan dekarbonisasi serta penggunaan energi bersih dan terbarukan semakin tinggi
- Indonesia hanya mampu menambah (diversifikasi) 11 produk baru dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam 15 tahun terakhir (hanya berada di Grade C). Sementara Vietnam mampu melakukan diversifikasi sampai 41 produk baru (Grade A+)

- Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, seperti:
 - Di tahun 2023 Indonesia berkontribusi terhadap 50% total produksi nikel global, namun produk yang diekspor sebagian besar masih berupa *intermediate product* (seperti feronikel, nikel *matte*) karena investasi di industri hilir nikel (seperti *stainless steel* dan baterai) relatif lebih sedikit.
 - Pada tahun 2023, *supply* minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton namun 51,6% diantaranya langsung diekspor dalam bentuk CPO dan hanya 24,0% yang diolah lebih lanjut sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri.
 - Pada tahun 2023, produksi rumput Laut mencapai 9,75 juta ton, namun ekspor rumput laut baru mencapai USD 433,71 juta. Saat ini, diversifikasi rumput laut Indonesia masih terbatas pada rumput laut kering (*raw material*), karagenan dan tepung agar-agar. Sementara itu, masih terdapat potensi diversifikasi rumput laut bernilai tinggi yang dapat dikembangkan, seperti biostimulan, *biofuel*, dan bioplastik.

Arah Kebijakan

- Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Isu

- Belum optimalnya infrastruktur dan layanan konektivitas, di antaranya simpul utama dan jaringan transportasi multimoda yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan
- Daya saing SDM dan pelaku usaha dalam negeri di bidang logistik masih perlu ditingkatkan, salah satunya terkait pemanfaatan teknologi digital.
- Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas investasi yang menghambat ekonomi tumbuh lebih tinggi
- Stagnasi kinerja ekspor Indonesia selama 20 tahun terakhir dan rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global
- Kompleksitas produk ekspor rendah serta daya saing ekspor masih didominasi oleh komoditas
- Peningkatan hambatan perdagangan tarif dan nontarif termasuk kebijakan *green trade* berpotensi menurunkan daya saing produk
- Belum terbangunnya ekosistem perdagangan sektor jasa
- Ketimpangan dalam aktivitas perdagangan antarwilayah
- Kerja sama bilateral, regional, dan global terkait penciptaan tata kelola maritim
- Potensi peningkatan ekspor:
 1. Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit sebesar US\$ 12 Miliar
 2. Produk Kendaraan Bermotor sebesar US\$ 4,8 Miliar
 3. Produk Komponen Elektronik sebesar US\$ 2 Miliar
- Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar. Ekspor kopi nasional mencapai US\$ 929 juta pada 2023
- Sulawesi Selatan penghasil rumput laut terbesar. Ekspor rumput laut nasional mencapai USD 433,71 juta pada tahun 2023
- Riau penghasil kelapa terbesar. Ekspor olahan kelapa nasional mencapai US\$ 892 juta pada 2023

Arah Kebijakan

- Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- Optimalisasi investasi strategis negara

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perckonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif.

Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan

dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan kedepan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan perlu didukung dengan pendekatan kota cerdas, kelembagaan yang adaptif-dinamis serta komitmen pemerintah daerah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan.

Tabel III.6 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%) ^{a)}	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) ^{b)}	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
7	Persentase desa mandiri (%) ^{c)}	22,85	23,29	25,79
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) ^{b)}	44,13 (2022)	44,35	45,60

Keterangan: a) menggunakan US\$ 2,15 PPP tahun 2017; b) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029; dan c) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1



Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Isu

- Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat
- Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan
- Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal
- Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan

Arah Kebijakan

- Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

Sasaran 2



Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Isu

- Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
- Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Arah Kebijakan

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

Sasaran 3



Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Isu

- Angka kemiskinan perdesaan masih tinggi 12,22 persen (BPS, 2023)
- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi. Terdapat desa yang layanan dasar sudah terpenuhi namun masih terdapat desa yang layanan dasarnya belum baik. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan
- Aktivitas ekonomi desa dalam posisi rentan karena 96 persen ekonomi masyarakat desa didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing lemah sehingga membutuhkan penguatan dan diversifikasi
- Produktivitas dan pendapatan asli desa PADes terhadap ABPDesa masih sangat rendah (Proporsi PADes 2,1 persen dari total APBDes, 2023)
- Tata Kelola pemerintahan desa masih belum baik dan kualitas belanja desa (*quality of spending*) perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D dalam pembangunan desa
- Desa berketahanan iklim masih rendah (33,73 persen dari 75.259 desa) sementara bencana dan dampak perubahan iklim di desa semakin sering terjadi.

Arah Kebijakan

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

Sasaran 4



Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Isu

- Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, **kontribusi ekonomi yang tergolong rendah** jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019)
- **Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif** telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol
- **Ketersediaan dan akses layanan perkotaan** berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan **masih terbatas**, sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan **belum inklusif dan memadai**
- Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.
- Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi **tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi**
- Tingkat pencemaran dan **degradasi lingkungan yang semakin tinggi** di perkotaan, ditambah dengan **rendahnya ketangguhan perkotaan** terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan
- **Belum ada regulasi** yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang **dinamisnya kelembagaan**, serta **belum inovatifnya pembiayaan** pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045
- **Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa** (sebesar 56,10 persen) utamanya di **Wilayah Metropolitan Jakarta** menyebabkan beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Arah Kebijakan

- Pembangunan perkotaan berkelanjutan
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomit menuntut memperkuat

reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00—64,99	71,00—72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 ^{b)}
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70	1,60
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36	13,75—18,00
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52—15,00
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

Isu

- Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai 90% dari tahun 2022 ke tahun 2023)
- Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan.
- Belum optimalnya proses penanganan perkara
- Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara

- Biaya politik tinggi, pendanaan parpol belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal
- Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat
- Skor Indeks Akses terhadap Keadilan mengalami penurunan pada tahun 2021 (53,6)

Arah Kebijakan

- Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
- Reformasi Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

- Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
- Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal

Sasaran 2

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Isu

- Disparitas kesejahteraan ASN;
- Keterpaduan antara layanan publik belum optimal
- Akses pelayanan publik belum memadai;
- Penerapan sistem merit belum optimal;
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif
- Tata kelola pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, termasuk PMI, yang belum terintegrasi

- Belum optimalnya hubungan pemerintah pusat dan daerah
- Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah
- Tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD dengan rata-rata proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai 83% (2018-2024)
- Rendahnya belanja modal pemerintah daerah, dengan rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai 17,04% dari total belanja daerah (2018-2024)

Arah Kebijakan

- Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
- Pemerintah Digital
- Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
- Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

Sasaran 3



Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Isu

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar **1,73%** atau sekitar **3,33 juta jiwa**, angka relapse mencapai lebih dari 70%, ditambah dengan munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Arah Kebijakan

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sasaran 4



Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan

Isu

- **Rendahnya daya saing BUMN** (Jumlah BUMN yang masuk peringkat dunia masih di bawah 10)
- **Rasio BUMN dengan kategori sehat masih perlu ditingkatkan** (rasio BUMN dengan kategori sehat 77,10% pada tahun 2023)
- Belum meratanya **kemampuan BUMN dalam menghasilkan dividen**
- Masih banyaknya BUMN yang **merugi** dalam menjalankan penugasan

Arah Kebijakan

Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

Sasaran 5



Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

Isu

Kompleksnya tantangan kebijakan fiskal di Indonesia dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- Rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan, mencakup *administrasi gap* maupun *policy gap*
- Kualitas dan *size* belanja negara belum optimal
- Belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan non-utang untuk mendorong sasaran pembangunan

Arah Kebijakan

- Optimalisasi Pendapatan Negara
- Optimalisasi Belanja Negara
- Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

Sasaran 6



Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Isu

Fluktuasi inflasi dari sisi domestik banyak dipengaruhi oleh fluktuasi komponen Inflasi Harga Bergejolak yang secara historis tercermin dari realisasi tahun 2020-2023 secara berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia yang banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya multi-sektor (pasokan, teknologi manajemen pasca panen, infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta data dan kualitas data).

Arah Kebijakan

Pengendalian Inflasi

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antar generasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel III.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,70
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1



Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Isu

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama, ditunjukkan dengan potensi zakat di Indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023), namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023).
- Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang tercermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (Indeks Persepsi Korupsi, 2023)].
- Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)].
- Masih kurangnya jaminan perlindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat, ditunjukkan dengan masih terbatasnya wilayah adat yang tersertifikasi (5,99 persen dari total 7,51 juta hektare wilayah adat) dan pengakuan hutan adat [8 persen dari total 3,4 juta hektare potensi hutan adat (BRWA, 2024)].
- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023), 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022), serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)].
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan kebudayaan yang inklusif, tercermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)].
- Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,13 (2023)].
- Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)].

Arah Kebijakan

- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- Palastarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

Sasaran 2



Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu

- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar (Indo-Australia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki enam zona subduksi serta 13 segmen megathrust dan 295 segmen sesar aktif (Pusat Gempa Nasional, 2017)
- 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta keluarga (Katalog Desa Rawan Bencana BNPB, 2019)
- Tingginya tingkat kerentanan bencana, yang disebabkan 75 persen infrastruktur dasar berada di zona rawan bencana (BMKG, 2021)
- Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, dengan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46 yang tergolong dalam kategori sedang (BNPB, 2024)
- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim, dengan kenaikan muka air laut 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah pesisir rentan sebanyak 313 kab/kota, gelombang ekstrem > 1,5 m, dan perubahan curah hujan +/-2,5 mm/hari
- Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang
- Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana, sampai dengan saat ini tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6,00 persen dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan berisiko bencana tinggi (BNPB, 2024)

Arah Kebijakan

- Pembangunan berketahanan iklim
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

2.2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja.

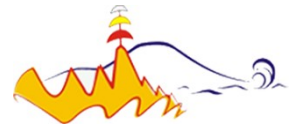
(Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12,38%
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	87,82%

BAB

III



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

No.	Interval Nilai Relaisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100%	Melampau Target	
2.	91%-100%	Sangat Tinggi	
3.	76%-90%	Tinggi	
4.	66%-75%	Sedang	
5.	51%-65%	Rendah	
6.	<50%	Sangat Rendah	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12,38	12,40	99,85
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87,82	87,31	99,42

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 12,40 %, ditunjukkan pada indikator Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan capaian kinerja 98,66%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 87,31 % ditunjukkan pada indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan capaian kinerja 98,22 %.

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12,38	12,40	99,85
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87,82	87,31	99,42

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sangat Tinggi	100,00 %
3	Tinggi	0.00 %
4	Sedang	0.00 %
5	Rendah	0.00 %
6	Sangat Rendah	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Misi 2	2	0	2	0	0	0	0
	Jumlah	2	0	2	0	0	0	0

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sangat Tinggi	2	100,00 %
3	Tinggi	0	0.00 %
4	Sedang	0	0.00 %
5	Rendah	0	0.00 %
6	Sangat Rendah	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

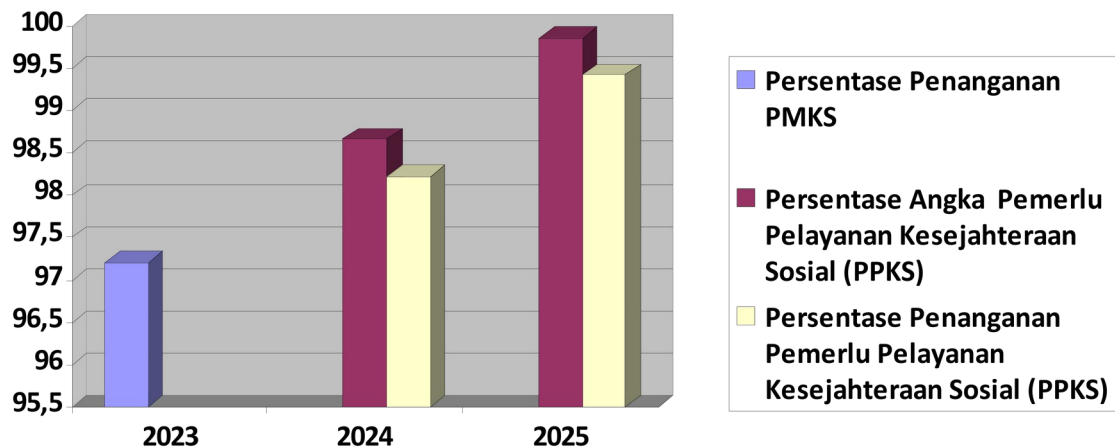
Tabel 3.8
Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	
					FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	Capaian
	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12,38%	12,40%	Jumlah PPKS Kabupaten 84.061 ----- x 100 % Jumlah Penduduk Kabupaten 678.021	99,85 %
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	87,82%	87,31%	Jumlah PPKS yang ditangani 73.397 ----- x 100 % Jumlah PPKS Kabupaten 84.061	99,42%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12,70	12,53	98,66	12,38	12,40	99,85%
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87	85,45	98,22	87,82	87,31	99,42%

Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : **Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Tahun 2025 adalah sebesar 12,38% dengan dari target sebesar 12,40% yang direncanakan *dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,85%, telah mencapai target yang Sangat Tinggi.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Tahun 2025 adalah sebesar 87,31% dengan dari target sebesar 87,82% yang direncanakan *dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,42 %, telah mencapai target yang Sangat Tinggi.



Dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tanggamus, Dinas Sosial didukung oleh mitra-mitra kerja Dinas Sosial diantaranya Pendiamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna.

Data PPKS Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	JENIS PPKS	DATA PPKS	TERTANGANI
1	2	3	4
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	0	0
2	Anak Telantar (AT)	456	456
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	0	0
4	Anak Jalanan	0	0

5	Anak Dengan Kesabilitas (ADK)	0	0
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	16	16
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	1621	1621
9	Penyandang Disabilitas	742	742
10	Tuna Susila	0	0
11	Gelandangan	21	21
12	Pengemis	0	0
13	Pemulung	0	0
14	Kelompok Minoritas	0	0
15	Berkas warga Binaan Lembaga Permayarakatan	0	0
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	0	0
18	Korban Trafiking	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0
21	Korban Bencana alam	85	85
22	Korban Bencana Sosial	89	89
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0
24	Fakir Miskin	81.031	7 0.367
25	Komunitas Adat terpencil	0	0
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0
	Jumlah Jiwa	84.061	73.397



Batuan Permakanan dan Sandang Korban Bencana Banjir, Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.



Bantaun Permakanan dan Sandang Korban Gempa Bumi, Pekon Sidodadi, Karang Rejo dan Tugu Rejo, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.



Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus.



Bantuan Permakanan dan Sandang Korban Bencana Banjir di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah :

- a) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
- b) Belum optimalnya koordinasi antara para mitra kerja Dinas Sosial sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan belum tereduksi dalam penganggaran
- c) Belum optimalnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tanggamus sehingga masih banyak PPKS yang belum mendapatkan bantuan dan jaminan sosial.

Solusi dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sehingga keberhasilan yang dicapai maksimal adalah :

- a) Diperlukannya SDM yang benar-benar berkompetensi sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b) Diperlukannya koordinasi yang baik antara para mitra kerja Dinas Sosial sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran.
- c) Diperlukannya verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kabupaten Tanggamus.

Faktor penunjang lain untuk keberhasilan Program dengan optimalisasi :

- a). Organisasi yang efektif dan efiseien.
- b) SDM pegawai yang memadai.
- c). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, faktor pengelolaan manajemen kinerja sangat diperlukan. Hal ini menjadi sistem yang dilakukan untuk mengarahkan sumber daya yang ada menuju kepada pencapaian tujuan secara efektif. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus. Efektivitas dan efisiensi merupakan arah yang

akan diraih dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pencapaian hasil kinerja yang telah diperoleh merupakan sarana untuk melakukan evaluasi dan penilaian kepada seluruh komponen di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Selain melalui APBD Kabupaten Tanggamus dalam menunjang capaian kinerja Dinas Sosial Juga di dukung oleh beberapa sumber dana lembaga lainnya diantaranya melalui Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), BAZNAS, maupun bantuan langsung dari Kementerian Sosial baik Bantuan PKH, BPNT dan BLT.

3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tahun 2025 berdasarkan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Persentase Alokasi Anggaran Per Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus**

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	
			Rp	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	Rp. 3.424.796.534,62	78,97%
2.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp.863.916.900,00	19,92%
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp. 47.821.800,00	1,09%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Berikut urutan prioritas paling atas apabila dilihat dari pembagian alokasi anggaran persasaran :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan (78,97%)
2. Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (19,92%)
3. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (1,09%)

3.2.2 PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN PENGANGGARAN 2025

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah pemangku pelayanan kepada masyarakat yang di evaluasi dan dinilai oleh Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Umbusbman dengan total Nilai Kepatuhan Tahun 2024 dengan 93,51 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan rincian sebagai berikut :

DIMENSI INPUT :

1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2	3	4		
1	Pengetahuan tentang Komponen Standar Pelayanan	12.22	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman tentang Pengetahuan tentang komponen satndar pelayanan
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	100	100	100	100	95	
3	Pengetahuan tentang Lembaga Ombusdman	4.58	100	100	100	80	89	
4	pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang bentuk-bentuk maladmisnistrasi
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombusman	4.58	100	100	100	100	95	
6	Pengetahuan tentang pelayanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	80	80	100	40	69	untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
Kompetensi Pelaksana		38.20	97.99	89.19	100	82.77	87.27	
No.	Indikator			Bobot		Hasil Penilaian		Keterangan

			(%)	
1	Frekuensi pengawasan Internal	8.06	100	
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	80	Untuk ketersediaan jumlah petugas agar disediakan dengan kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	100	
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100	
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	80	Agar menyesuaikan untuk ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100	
7	ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100	
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100	
9	Ketersediaan Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	100	
Sarana Prasarana		61.80	95.53	

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2		
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100	
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100	
3	Ketersediaan Jangka Waktu penyelesaian	10.66	100	100	100	
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100	
5	Ketersediaan Produk pelayanan	9.00	100	100	100	
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100	
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	100	100	100	
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60	
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	100	100	100	
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100	
11	Ketersediaan Atribut	7.96	60	60	60	Untuk dilengkapi ketersediaan atribut untuk Petugas layanan
12	Ketersediaan Pelayanan terpadu	12.78	80	80	80	Untuk Pelayanan terpadu agar ditingkatkan
Standar Pelayanan		100.00	91.08	91.08	91.08	

Produk Layanan	
1	Pelayanan Bantuan Bencana
2	Rekomendasi BPJS/KIS APBD

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian	Jumlah Responden
-----	-----------	-------	-----------------	------------------

			(%)		
1	Penundaan berlarut	1.60	100.00	1	4
2	Permintaan imbalan	18.40	100.00		
3	Penyimpangan Prosedur	18.40	100.00		
4	Tidak Kompeten	14.40	100.00		
5	Tidak Patut	12.00	100.00		
Standar Pelayanan		80.00	91.08		

DIMENSI OUTPUT

2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM	20.00	60
SPM/IKM		20.00	60.00

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pemngelolaan pengaduan	27.34	100
	Penyelenggara Pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	100
	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	100
	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	100
	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
1	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	100.00

Hasil Penilaian (%)	Skala
100	5
80	4
60	3
40	2
20	1
10	0

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025 berdasarkan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Kegiatan 2025

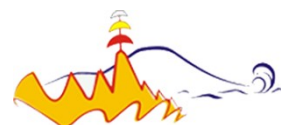
No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12,38%	12,40%	99,85%	Rp. 863.916.900	Rp 732.364.232	84,77%	15,23%
		Persentase Penangan an Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	87,82%	87,31%	99,42%	Rp. 47.821.800	Rp. 34.968.950	73,12%	26,88%

Tabel 3.12 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja%	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A	Misi 2:	2			
1.	Memuaskan				
2.	Sangat Baik	2	√	Rp. 3.984.818.578,00	91,89
3.	Baik				
4.	Cukup Baik				
5.	Agak Kurang				
6.	Kurang				
				Rp. 3.984.818.578,00	91,89

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2025, didukung oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025. Jumlah anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Daerah tahun 2025 adalah sebesar **Rp.4.336.535.234,62**.

BAB IV



PENUTUP

4.1 UKURAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, sasaran strategis yang telah disusun diimplementasikan dalam bentuk 7 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan kegiatan yang menyangkut pelayanan yang mendukung pencapaian sasaran dan kebijakan. Keberhasilan kinerja dilihat dari hasil pengukuran atau penilaian tingkat kinerja yang dicapai tahun 2025 dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam pencapaian ukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 dari 2 indikator kinerja utama yang mencapai target sebanyak 2 indikator dengan capaian 100% sesuai target dengan satu indikator kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil untuk pelaksanaan Belanja Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Program yang diuraikan dalam 14 (empat belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.984.818.578,00 Atau 91,89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.336.535.234,62.

4.2 SIMPULAN

Berdasarkan uraian realisasi kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik berdasarkan realisasi indikator sasaran strategis. Laporan kinerja ini memberikan gambaran bahwa penetapan kinerja yang telah disusun pada awal pelaksanaan tahun pelaksanaan kerja telah mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan capaian hasil kinerja yang telah diperoleh pada tahun anggaran 2025, maka sasaran strategis mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah akan menjadi salah satu program unggulan dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mendukung tercapainya program dan rencana strategis kepala daerah yang telah dicanangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2025-2029.

Namun demikian sasaran strategis dan program lainnya akan terus dipertahankan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja unggulan. Hasil capaian kinerja yang telah diperoleh akan tetap dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan untuk pencapaian kinerja secara menyeluruh dari kegiatan dan program yang telah dicanangkan. Oleh karena itu

keberlanjutan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang akan datang sangat diperlukan, supaya hasil kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi program kepala daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan masyarakat secara luas.

4.3 REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, terdapat banyak faktor yang pendukung dan penghambat dalam merealisasikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Namun realisasi kinerja yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dapat dikategorikan sebagai suatu keberhasilan yang telah dicapai berdasarkan perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.984.818.578,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh DelapanRupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah 91,89 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 perlu ditingkatkan khususnya pada indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh karena itu perlu ada rekomendasi pelaksanaan yaitu:

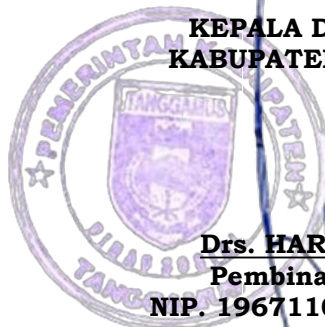
1. Komitmen pimpinan dan dukungan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanggamus.
2. Mitra kerja Dinas Sosial baik SKPD maupun mitra kerja lainnya yang mendukung dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Pembinaan dan pengawasan para mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus guna peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Sumber daya yang proporsional dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001



LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2025)**

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Triwulan IV Bulan Desember 2025

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
I.	BELANJA PERANGKAT DAERAH										
1.06.1.06.01.00	DINAS SOSIAL	Rp.	4,336,535,234.62	3,984,818,578.00	351,716,656.62	91.89	100.00	91.89			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL	Rp.	4,336,535,234.62	3,984,818,578.00	351,716,656.62	91.89	100.00	91.89			
I.	BELANJA	Rp.	4,336,535,234.62	3,984,818,578.00	351,716,656.62	91.89					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3,424,796,534.62	3,217,485,396.00	207,311,138.62	93.95					
1.06.1.06.01.00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	22,513,600.00	21,943,600.00	570,000.00	97.47					
1.06.1.06.01.00.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	3,423,500.00	2,973,500.00	450,000.00	86.86					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Buku	30	30	0		100	100.00			
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Buku	30	30	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	3,575,000.00	3,575,000.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	0	10		100	-			
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	0	10		100	-			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.03	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	4,956,800.00	4,956,800.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	0	10		100	-			
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	0	10		100	-			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.04	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,122,500.00	2,050,500.00	72,000.00	96.61					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	10	0		100	100.00			
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	10	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.05	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	4,433,000.00	4,433,000.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	10	0		100	100.00			
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	10	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.06	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,068,300.00	1,068,300.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Eks.	10	10	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Eks.	10	10	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.01.07	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,934,500.00	2,886,500.00	48,000.00	98.36					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Buku	20	20	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Buku	20	20	0		100	100.00			

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
1.06.1.06.01.00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3,021,153,788.62	2,900,472,927.00	120,680,861.62	96.01					
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,544,281,188.62	2,431,500,327.00	112,780,861.62	95.57					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	412,182,500.00	406,682,500.00	5,500,000.00	98.67					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.02.03	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	63,240,000.00	60,840,000.00	2,400,000.00	96.20					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.02.05	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,450,100.00	1,450,100.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Buku	10	10	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	Buku	10	10	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Rp.	2,172,000.00	2,172,000.00	-	100.00					
1.06.1.06.01.00.01.2.03.06	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,172,000.00	2,172,000.00	-	100.00					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Laporan	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	146,011,746.00	116,610,766.00	29,400,980.00	79.86					
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	53,588,000.00	52,013,999.00	1,574,001.00	97.06					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	10	10	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.06.04	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	10,100,000.00	7,524,000.00	2,576,000.00	74.50					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	10,236,500.00	9,628,100.00	608,400.00	94.06					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.06.07	4. Penyediaan Bahan/Material										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	15,806,246.00	15,306,246.00	500,000.00	96.84					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	-		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	-		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	56,281,000.00	32,138,421.00	24,142,579.00	57.10					
	Lokasi : Kabupaten Tanggamus dan Luar Daerah										
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	35	15		100	70.00			
	Hasil : Tertibnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	35	15		100	70.00			

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
1.06.1.06.01.00.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	60,513,000.00	43,551,796.00	16,961,204.00	71.97					
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	44,105,000.00	28,073,796.00	16,031,204.00	63.65					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	16,408,000.00	15,478,000.00	930,000.00	94.33					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	172,432,400.00	132,734,307.00	39,698,093.00	76.98					
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	44,170,000.00	37,142,000.00	7,028,000.00	84.09					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatan	Unit	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	99,527,400.00	69,727,707.00	29,799,693.00	70.06					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	0		100	100.00			
	Hasil : Tertibnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Unit	6	6	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	10,310,000.00	7,510,000.00	2,800,000.00	72.84					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	8	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.01.2.09.09	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	18,425,000.00	18,354,600.00	70,400.00	99.62					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	0		100	100.00			
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	47,821,800.00	34,968,950.00	12,852,850.00	73.12					
1.06.1.06.01.00.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	47,821,800.00	34,968,950.00	12,852,850.00	73.12					
1.06.1.06.01.00.02.2.03.01	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	9,929,800.00	8,562,700.00	1,367,100.00	86.23					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSM	Orang	30	30	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah PSM Yang Aktif	Orang	30	30	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.02.2.03.02	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	9,495,500.00	7,626,150.00	1,869,350.00	80.31					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan TKSK	Orang	20	20	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah TKSK Yang Aktif	Orang	20	20	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	21,273,500.00	18,780,100.00	2,493,400.00	88.28					

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSKS Keluarga	Orang	114	114	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah PSKS Keluarga Yang Aktif	Orang	114	114	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	7,123,000.00	-	7,123,000.00	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat	Orang	19	0	19		100	-			
	Hasil : Terbny Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat	Orang	19	0	19		100	-			
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	2,770,000.00	-	2,770,000.00	0.00					
1.06.1.06.01.00.03.2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp.	2,770,000.00	-	2,770,000.00	0.00					
1.06.1.06.01.00.03.2.01.01	1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran	Orang	5	0	5		100	-			
	Hasil : Jumlah Warga Negara Migran yang tertangani	Orang	5	0	5		100	-			
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	325,722,600.00	247,147,454.00	78,575,146.00	75.88					
1.06.1.06.01.00.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp.	236,513,100.00	209,747,954.00	26,765,146.00	88.68					
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01	1 Penyediaan Permakanan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	81,155,000.00	77,356,006.00	3,798,994.00	95.32					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	474	474	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Penyediaan Permakanan	Orang	474	474	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02	2 Penyediaan Sandang										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	45,445,000.00	43,223,578.00	2,221,422.00	95.11					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	528	528	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Penyediaan Permakanan	Orang	528	528	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03	3 Penyediaan Alat Bantu										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	63,157,200.00	56,757,810.00	6,399,390.00	89.87					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	31	31	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Sandang	Orang	31	31	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.04	4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	9,075,000.00	3,000,000.00	6,075,000.00	33.06					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	7	2	5		100	28.57			
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	7	2	5		100	28.57			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.05	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	0.00	-	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	0	0	0		100	#DIV/0!			
	Hasil : Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0		100	#DIV/0!			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.09	6 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	30,763,400.00	29,410,560.00	1,352,840.00	95.60					

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	0		100	100.00			
	Hasil : Terlaksananya Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.10	7 Pemberian Layanan Kedaruratan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	0	0.00	-	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	0	0	0		100	-			
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Orang	0	0	0		100	-			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.11	8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	0	0.00	-	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0		100	-			
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Orang	0	0	0		100	-			
1.06.1.06.01.00.04.2.01.12	9 Pemberian Layanan Rujukan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	6,917,500.00	-	6,917,500.00	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	5		100	-			
	Hasil : Terlaksananya Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	5		100	-			
1.06.1.06.01.00.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp.	89,209,500.00	37,399,500.00	51,810,000.00	41.92					
1.06.1.06.01.00.04.2.02.02	1. Pemberian Layanan Kedaruratan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	-					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	LS	0	0	0		100	#DIV/0!			
	Hasil : Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan	LS	0	0	0		100	#DIV/0!			
1.06.1.06.01.00.04.2.02.14	2 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	89,209,500.00	37,399,500.00	51,810,000.00	41.92					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	22	12	10		100	54.55			
	Hasil : Jumlah Kerjasama Antar Lembaga	Dokumen	22	12	10		100	54.55			
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	106,228,000.00	99,208,274.00	7,019,726.00	93.39					
1.06.1.06.01.00.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	106,228,000.00	99,208,274.00	7,019,726.00	93.39					
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	106,228,000.00	99,208,274.00	7,019,726.00	93.39					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	Bulan	12	12	0		100	100.00			
6.	Program Penanganan Bencana	Rp.	413,873,700.00	375,489,216.00	38,384,484.00	90.73					
1.06.1.06.01.00.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp.	383,441,700.00	345,057,216.00	38,384,484.00	89.99					
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01	1. Penyediaan Makanan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	133,428,300.00	129,721,400.00	3,706,900.00	97.22					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	250	0		100	100.00			
	Hasil : Terlaksananya Penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	250	0		100	100.00			

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9
1.06.1.06.01.00.06.2.01.02	2 Penyediaan Sandang										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	110,825,000.00	107,244,827.00	3,580,173.00	96.77					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	0		100	100.00			
	Hasil : Terlaksananya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.06.2.01.03	3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	38,520,000.00	37,356,523.00	1,163,477.00	96.98					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04	4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	87,700,000.00	62,194,466.00	25,505,534.00	70.92					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	0		100	100.00			
	Hasil : Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.06.2.01.05	5 Pelayanan Dukungan Psikososial										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	12,968,400.00	8,540,000.00	4,428,400.00	65.85					
	Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur										
	Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0		100	100.00			
	Hasil : Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0		100	100.00			
1.06.1.06.01.00.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	30,432,000.00	30,432,000.00	-	100.00					
1.06.1.06.01.00.06.2.02.02	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	30,432,000.00	30,432,000.00	-	100.00					
	Lokasi : Kabupaten Tanggamus										
	Keluaran : umlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	55	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	55	55	0		100	100.00			

7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	15,322,600.00	10,519,288.00	4,803,312.00	68.65					
1.06.1.06.01.00.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.	15,322,600.00	10,519,288.00	4,803,312.00	68.65					
1.06.1.06.01.00.07.2.01.02	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	15,322,600.00	10,519,288.00	4,803,312.00	68.65					
	Lokasi : Kabupaten Tanggamus										
	Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	0		100	100.00			
	Hasil : Jumlah Terlaksananya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1	1	0		100	100.00			

Kode Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil	Satuan	Anggaran (Rp.)			Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Target Kinerja (Keluaran & Hasil)		Permasalahan/Hambatan	Pemecahan Masalah/Rekomendasi	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Sisa		Rencana (%)	Realisasi (%)			
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7	8	9

Kota Agung, Mei 2025

KERANGKASAN SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS




Mrs. HARDASYAH, M.M

NIP. 19671105 199312 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025-2029**

1. Nama Organisasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
 2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial
 3. Fungsi : a. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang sosial
 b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program bidang sosial
 c. Menetapkan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program bidang sosial
 d. Merencanakan operasional standar pelayanan minimal bidang sosial
 e. Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha di bidang sosial
 f. Memberikan rekomendasi di bidang sosial
 g. Melaporkan hasil kerja di bidang sosial dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir	PENANGGUNG JAWAB
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)
1.	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Angka Kemiskinan					%	10.28	10.05	9.82	9.59	9.37	9.16	9.16	9.16	Dinas Sosial
			Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS kabupaten ----- x 100 % Jumlah Penduduk Kabupaten	Laporan Tahunan Dinas Sosial	%	12.53	12.38	12.22	12.08	11.93	11.79	11.67	11.67	Dinas Sosial
			Permasalahan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang ditangani ----- x 100 % Jumlah PPKS Kabupaten	Laporan Tahunan Dinas Sosial	%	85.45	87.82	88.30	89.04	89.34	89.60	89.91	89.91	Dinas Sosial



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS

Drs. HARDASYAH, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671105 199312 1 001

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Ket. (Yang Membidang
1	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87.82	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PMKS	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	100	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Orang	181	52,913,800	Bidang Pemberdayaan Sosial
										Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	9,929,800	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	9,495,500	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	130	26,365,500	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	7,123,000	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Ket. (Yang Membidang
2	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	Orang	20	2,770,000	Bidang Pemberdayaan Sosial
										Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Orang	10	2,770,000	
2	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan dan Pengemis yang terpebuhi kebutuhan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	100	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	1182	236,513,100	Bidang Rehabilitasi Sosial
										Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Penyediaan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	470	81,155,000	
										Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	528	45,445,000	
										Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	63,157,200	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Ket. (Yang Membidang
										Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	9,075,000	
										Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	30,763,400	
										Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pelayanan dan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	6,917,500	
3	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Orang	25	89,209,500	Bidang Pemberdayaan Sosial
										Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	25	89,209,500	
4	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Penanganan PMKS Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	%	100	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	106,228,000	Bidang Pengembangan Sosial
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Valid	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	106,228,000	
5	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Penanganan PMKS Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Makanan, Sandang, Tempat Penampungan Pengungsi Bagi Korban Bencana Alam Dan Sosial	%	531	383,441,700	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
										Penyediaan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Permakanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	133,428,300	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Ket. (Yang Membidang
										Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	110,825,000	
										Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya tempat pengungsi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	38,520,000	
										Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	87,700,000	
										Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	12,968,400	
										Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga Bencana	Orang	55	30,432,000	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	55	30,432,000	
6	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Permasalahan Sosial	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12.38	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Kenyamanan dalam pelaksanaan Peringatan Pahlawan	%	100	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	100	15,322,600	
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan baik	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bulan	12	15,322,600	

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Tujuan				Sasaran Pendukung														Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Pendukung	Indikator sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius	Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	9,90	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	Indeks	BB	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	22,752,100
													Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	Dokumen	10	3,423,500
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	3,575,000
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	Dokumen	10	4,956,800
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	2,361,000
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	4,433,000

Tujuan				Sasaran Pendukung														Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Pendukung	Indikator sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Dokumen	18	1,068,300
													Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ	Laporan	20	2,934,500
													Tersusunnya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Dokumen Keuangan	%	100	3,021,153,789
													Tersedianya Gaji dan Tunjangan dan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang	25	2,544,281,189
													Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Orang	23	412,182,500
													Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	63,240,000
													Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	5	1,450,100

Tujuan				Sasaran Pendukung														Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Pendukung	Indikator sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	
													Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	2,172,000
													Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	2,172,000
													Terlananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum	%	100	146,011,746
													Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	53,588,000
													Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Paket	1	10,100,000
													Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	10,236,500
													Tersedianya Bahan/Material kantor Penunjang Kegiatan kantor	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket	1	15,806,246

Tujuan				Sasaran Pendukung														Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Pendukung	Indikator sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	
													Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	100	56,281,000
													Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	60,513,000
													Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	44,105,000
													tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Laporan	1	16,408,000
													Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	172,432,400

Tujuan				Sasaran Pendukung														Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Pendukung	Indikator sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	
													Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	Unit	1	44,170,000
													Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6	99,527,400
													Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Unit	18	10,310,000
													Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit	1	18,425,000

**DAFTAR JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
SELAMA TAHUN 2025**

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	YANG MENYERAHKAN	TEMPAT PENYERAHAN	Dokumentasi	KETERANGAN
1	Penghargaan Sebagai Peserta DPD RI Awards 2025	DPD RI	DPD RI	Bandar Lampung		Diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat Sangat Baik pada PEKPPP Tahun 2024	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bandar Lampung		Diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
3	Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) Kualitas Tertinggi dengan Nilai 93,51	OMBUSMAN RI	Ketua Ombusman Republik Indonesia	Bandar Lampung		Diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
4	Juara I Kategori Perangkat Daerah Musrenbang Film Festival Tahun 2025	Baperida Kabupaten Tanggamus	Bupati Tanggamus	Kotaagung		Diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Kota Agung, Januari 2026
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TANGGAMUS


Drs. HAI DASYAH, M.M
NIP. 19671105 199312 1 001